

Diskursus Politik Digital pada Komentar Instagram GNFI Berbasis Korpus

Hana Restu Pratiwi¹, Fajar Junaedi²

^{1,2}Magister Media dan Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia
fajarjun@umy.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pola diskursus politik digital dalam komentar pengguna Instagram Good News From Indonesia (GNFI) dengan pendekatan analisis korpus. Data penelitian berupa komentar pengguna pada unggahan bertema politik yang dikumpulkan, disusun secara kronologis, dan diolah menjadi satu korpus digital. Analisis dilakukan menggunakan Voyant Tools melalui fitur Cirrus, TermsBerry, Trends, Documents, dan Bubblelines untuk mengidentifikasi frekuensi kata, relasi semantik, karakteristik linguistik, serta distribusi istilah dalam korpus. Hasil penelitian menunjukkan dominasi istilah "bukti", "pernyataan", "tindakan", "presiden", dan "pihak" yang memperlihatkan kuatnya perhatian warganet terhadap validitas informasi, evaluasi pernyataan, dan tindakan aktor politik. Relasi antarterm serta distribusinya dalam korpus mengindikasikan alur diskursif verifikasi-evaluasi-tuntutan akuntabilitas, ketika perhatian terhadap bukti berkembang menuju evaluasi atas pernyataan dan tuntutan terhadap tindakan. Distribusi istilah berdasarkan urutan kronologis komentar juga memperlihatkan perubahan penekanan dari persoalan validitas informasi menuju evaluasi pernyataan dan tindakan politik. Diskursus menunjukkan kecenderungan personalisasi ketika evaluasi terhadap kebijakan dan tindakan diarahkan kepada figur politik yang diasosiasikan dengannya. Temuan ini menunjukkan bahwa kolom komentar GNFI tidak hanya menjadi ruang respons terhadap informasi, tetapi juga menjadi ruang negosiasi makna tempat legitimasi politik dipertanyakan dan dinegosiasikan melalui interaksi pengguna. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada kajian komunikasi politik digital dengan mengidentifikasi alur diskursif verifikasi-evaluasi-tuntutan akuntabilitas sebagai salah satu pola pembentukan legitimasi serta menunjukkan bahwa evaluasi pengguna terhadap informasi, pernyataan, tindakan, dan figur politik menjadi bagian penting dalam proses negosiasi legitimasi di ruang digital.

Kata kunci: analisis korpus; diskursus politik digital; Instagram; legitimasi politik; media sosial

ABSTRACT

This study aims to analyze patterns of digital political discourse in user comments on the Instagram account of Good News From Indonesia (GNFI) using a corpus-based approach. The data consist of user comments on a political post, which were collected, chronologically organized, and compiled into a digital corpus. The analysis was conducted using Voyant Tools, specifically Cirrus, TermsBerry, Trends, Documents, and Bubblelines, to identify word frequencies, semantic relations, linguistic characteristics, and term distributions across the corpus. The findings reveal the dominance of the terms "evidence," "statement," "action," "president," and "actor," indicating users' strong attention to information validity, the evaluation of political statements, and the actions of political actors. The relationships among these terms and their distribution across the corpus indicate a discursive trajectory of verification-evaluation-accountability demands, in which attention to evidence develops into the evaluation of statements and demands for action. The chronological distribution of terms also demonstrates a shift in emphasis from information validity toward the evaluation of political statements and actions. The discourse further shows a tendency toward personalization, as evaluations of policies and actions are directed at political figures associated with them. These findings suggest that GNFI's comment section functions not merely as a space for responding to information but also as a site of meaning negotiation where political legitimacy is questioned and negotiated through user interactions. Thus, this study contributes to digital political communication research by identifying verification-evaluation-accountability demands as a

discursive pattern of legitimacy formation and demonstrating that users' evaluations of information, statements, actions, and political figures constitute an important part of the negotiation of legitimacy in digital spaces.

Keywords: corpus analysis; digital political discourse; Instagram; political legitimacy; social media

A. PENDAHULUAN

Media sosial dalam dua dekade terakhir telah mengalami pergeseran fungsi yang sangat signifikan, dari sekadar medium komunikasi interpersonal menjadi ruang publik digital yang berperan sentral dalam proses pembentukan opini publik, ekspresi sikap politik, serta negosiasi makna sosial dan politik (Eko Wahyunto, 2025). Transformasi ini menandai perubahan struktural dalam cara masyarakat berinteraksi, berpartisipasi, dan memaknai realitas politik. Ruang publik yang sebelumnya terikat oleh batas geografis dan institusional bergeser ke ruang virtual yang bersifat terbuka, cair, dan berlapis, sehingga memungkinkan interaksi lintas kelas sosial, generasi, dan identitas berlangsung secara simultan dan intensif (Nasrudin et al., 2025).

Pergeseran tersebut merekonfigurasi relasi antara warga, media, dan kekuasaan, di mana

produksi makna politik semakin ditentukan oleh praktik komunikasi sehari-hari dalam ruang digital. Perkembangan ini memperkuat posisi media sosial sebagai arena strategis dalam kehidupan demokrasi kontemporer. Media sosial tidak lagi berfungsi semata sebagai sarana distribusi informasi, tetapi juga sebagai ruang produksi wacana politik yang secara aktif membentuk cara publik memahami kekuasaan, legitimasi, serta relasi antara warga dan aktor politik (Prasojo, 2026).

Praktik komunikasi politik tidak lagi terbatas pada kanal formal seperti media massa atau institusi negara, melainkan berlangsung secara intens melalui interaksi sehari-hari warga di ruang digital yang bersifat informal, emosional, dan responsif terhadap dinamika isu aktual. Produksi makna politik tidak lagi dimonopoli oleh elite dalam ruang institusional, tetapi dinegosiasikan secara terus-menerus

oleh warga dalam percakapan digital (Pureklolon, 2016).

Berbagai kajian menunjukkan bahwa ruang publik digital membawa implikasi yang bersifat ambivalen bagi demokrasi. Media sosial membuka peluang demokratisasi komunikasi politik dengan memperpendek jarak antara warga dan elite serta memperluas partisipasi publik. Kerentanan terhadap kolonisasi oleh kepentingan politik tertentu, manipulasi agenda, serta produksi polarisasi yang semakin tajam juga menguat dalam ruang yang sama (Fatimah, 2025). Dalam konteks Indonesia, media sosial telah menjadi medium penting dalam pembentukan agenda politik, di mana aktor politik secara strategis memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan narasi, membangun citra, dan mengarahkan persepsi publik. Kondisi tersebut menantang ideal ruang publik deliberatif karena wacana publik kerap dikonstruksi oleh aktor yang memiliki sumber daya simbolik dan teknologis yang lebih besar (Irawan et al., 2025).

Transformasi ruang publik digital di Indonesia berlangsung secara pesat seiring dengan meningkatnya penetrasi media sosial di berbagai

lapisan masyarakat. Ruang politik tidak lagi terbatas pada arena fisik seperti rapat umum atau forum diskusi formal, tetapi berkembang ke dalam ruang digital yang memungkinkan politisi dan warga membangun identitas, ekspresi, serta kontestasi politik secara berkelanjutan (Pratama, 2019). Karakter ruang politik digital di Indonesia bersifat terdesentralisasi dan terfragmentasi, sehingga mendorong aktor politik untuk berkompetisi dalam membangun pengaruh melalui komunikasi daring sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat dalam diskursus politik sehari-hari (Iswadi, 2025).

Kolom komentar pada platform media sosial, khususnya Instagram, menempati posisi penting sebagai mikro-ruang publik tempat berlangsungnya produksi dan sirkulasi wacana politik secara organik. Kolom komentar tidak hanya berfungsi sebagai ruang reaksi terhadap informasi, tetapi juga sebagai arena artikulasi sikap, ekspresi emosi, kritik, tuntutan, serta negosiasi legitimasi kekuasaan. Partisipasi publik dalam ruang ini berlangsung relatif terbuka, meskipun tetap berada dalam struktur kekuasaan simbolik dan algoritmik

yang memengaruhi visibilitas serta jangkauan pesan (Birowo, 2025). Karakter ruang digital yang terbuka tersebut sejalan dengan Amin et al. (2018) yang menunjukkan bahwa media sosial membentuk ruang publik digital yang memungkinkan berbagai kelompok berkomunikasi secara terbuka, meskipun pada saat yang sama juga dapat memunculkan dinamika konflik dalam interaksi pengguna. Interaksi dalam kolom komentar memungkinkan publik memberikan respons secara langsung terhadap figur, pernyataan, maupun isu politik yang muncul dalam konten media sosial.

Karakter komunikasi politik digital dalam kolom komentar menunjukkan kecenderungan yang semakin personal, emosional, dan dialogis. Diskursus politik di ruang ini dapat muncul melalui beragam bentuk respons terhadap pernyataan, isu, dan representasi figur politik. Komentar warganet dalam konteks tersebut tidak hanya dapat dipahami sebagai respons terhadap konten, tetapi juga sebagai teks sosial yang memperlihatkan bagaimana pengguna memaknai aktor, tindakan, dan isu politik dalam ruang digital (Iswadi, 2025). Dengan

demikian, kolom komentar dapat menjadi ruang untuk mengamati pembentukan makna mengenai kepemimpinan, legitimasi, tanggung jawab politik, serta berbagai isu yang menjadi perhatian publik.

Sebagian besar penelitian terdahulu masih menitikberatkan pada analisis konten unggahan, strategi komunikasi aktor politik, atau dinamika kampanye digital. Kolom komentar sebagai arena diskursif organik relatif kurang mendapat perhatian, padahal interaksi dalam ruang ini dapat memperlihatkan dinamika relasi antara publik dan kekuasaan melalui respons pengguna terhadap isu politik (Birowo, 2025). Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya kajian yang secara khusus menempatkan kolom komentar sebagai locus utama dalam analisis diskursus politik digital.

Akun Instagram GNFI (*Good News From Indonesia*) merupakan salah satu platform media digital yang menyajikan informasi sosial, ekonomi, dan politik dengan pendekatan narasi populer di kalangan pengguna media sosial Indonesia. Dalam konteks penelitian ini, kolom komentar pada unggahan bertema politik GNFI menjadi ruang tempat pengguna memberikan

respons terhadap isu, pernyataan, dan figur politik yang ditampilkan. Karakter interaksi tersebut menjadikan akun ini relevan sebagai locus penelitian untuk mengamati bagaimana diskursus politik digital dibangun dan dinegosiasikan melalui praktik komunikasi pengguna di ruang digital.

Penelitian ini berfokus pada analisis diskursus politik dalam kolom komentar Instagram GNFI dengan menekankan pola bahasa, relasi semantik, serta distribusi istilah yang digunakan warganet dalam merespons figur dan isu politik. Pendekatan berbasis korpus digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan diskursif melalui frekuensi kata, keterkaitan antarterm, dan distribusi istilah dalam korpus. Kajian ini menjadi penting dalam konteks meningkatnya peran media sosial dalam diskursus politik serta masih terbatasnya penelitian yang secara khusus menempatkan kolom komentar sebagai arena utama analisis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan teoretis terhadap kajian komunikasi politik digital dengan menempatkan kolom komentar sebagai locus untuk memahami pembentukan dan

negosiasi makna politik dalam interaksi pengguna di media sosial.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Perkembangan media digital telah menggeser secara fundamental cara masyarakat membangun relasi sosial, produksi makna, dan praktik politik. Dalam masyarakat jaringan, komunikasi tidak sekadar menjadi medium penyampai pesan, melainkan sumber utama kekuasaan simbolik yang membentuk struktur sosial dan politik (Sari, 2026). Realitas sosial tidak lagi dipahami sebagai entitas yang berdiri di luar media, melainkan sebagai konstruksi yang dimediasi secara intensif oleh teknologi komunikasi, terutama media sosial (Puluhulawa et al., 2026). Dalam konteks ini, ruang publik mengalami transformasi dari arena deliberasi institusional menuju ruang komunikasi digital yang cair, terbuka, dan berlapis, tempat berbagai aktor memproduksi, menegosiasikan, dan memperebutkan makna politik.

Media sosial menyediakan ruang interaksi yang memungkinkan keterlibatan politik berlangsung dalam bentuk yang lebih personal dan emosional. Politik digital tidak lagi semata beroperasi dalam kerangka rasionalitas prosedural, tetapi semakin bergeser ke arah politik simbolik yang

berlandaskan pada identitas, afeksi, dan representasi figur (Birowo, 2025). Kondisi ini memperkuat fenomena personalisasi politik, di mana figur menjadi pusat utama produksi makna politik, sementara institusi dan kebijakan cenderung dipersepsikan melalui citra personal aktor politik yang dominan (Iswadi, 2025).

Dalam ruang publik digital, algoritma platform memainkan peran struktural dalam membentuk visibilitas wacana dan pola perhatian publik. Algoritma tidak hanya mengatur distribusi informasi, tetapi juga membangun lanskap makna politik dengan memperkuat konten yang memicu keterlibatan emosional tinggi. Mekanisme ini berkontribusi terhadap pembentukan filter bubble dan echo chambers yang mempersempit spektrum informasi, memperkuat homogenitas pandangan, serta mempercepat polarisasi politik (Syam, 2025).

Dalam struktur ini, komunikasi politik digital berkembang sebagai arena kontestasi simbolik yang sarat dengan afeksi, konflik identitas, dan fragmentasi publik.

Kolom komentar pada media sosial menempati posisi penting dalam

dinamika tersebut sebagai mikro-ruang publik yang memungkinkan interaksi langsung antara publik dan aktor politik. Kolom komentar berfungsi bukan hanya sebagai ruang respons terhadap konten, tetapi sebagai arena produksi wacana politik yang mencerminkan sikap, emosi, tuntutan, dan ekspektasi publik. Praktik komunikasi yang berlangsung di dalamnya mencerminkan karakter komunikasi politik digital yang personal, dialogis, dan berbasis afeksi, di mana legitimasi dan kekuasaan dinegosiasikan melalui interaksi sehari-hari (Birowo, 2025).

Diskursus politik digital dalam kolom komentar juga beroperasi dalam struktur polarisasi yang semakin menguat. Berbagai studi menunjukkan bahwa media sosial berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya partisanship, fragmentasi publik, dan degradasi kualitas percakapan politik (Amri & Yandri, 2025). Dalam konteks Indonesia, dinamika ini diperkuat oleh budaya komunikasi politik yang berorientasi figur dan simbol, di mana narasi personal dan afeksi sering kali lebih dominan dibandingkan perdebatan kebijakan substantif (Iswadi, 2025).

Kerangka teoretis ini menunjukkan bahwa diskursus politik digital tidak dapat dipahami semata sebagai pertukaran informasi, tetapi sebagai praktik sosial yang membangun realitas politik melalui simbol, afeksi, dan relasi kuasa. Kolom komentar menjadi locus strategis untuk mengamati bagaimana publik mengonstruksi makna politik, membangun identitas kolektif, serta menegosiasikan legitimasi kekuasaan dalam kehidupan sehari-hari di era komunikasi digital.

C. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dukungan analisis teks digital berbasis korpus untuk mengkaji wacana komentar warganet pada media sosial Instagram, khususnya pada akun GNFI. Pendekatan ini selaras dengan kerangka teoretis yang memandang komunikasi politik digital sebagai praktik sosial yang membangun makna, identitas, dan relasi kuasa dalam ruang publik digital. Teks digital tidak diperlakukan sebagai sekadar kumpulan unit linguistik yang dapat dihitung secara statistik, tetapi juga sebagai arena produksi makna yang

memperlihatkan bagaimana pengguna merespons dan memaknai figur serta isu politik dalam ruang komunikasi daring.

Dalam kajian komunikasi politik digital, analisis teks berbasis korpus dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola diskursus, struktur makna, serta kecenderungan penggunaan bahasa yang terbentuk dalam percakapan daring (Zaka, 2024).

Data penelitian berupa komentar pengguna pada satu unggahan bertema politik di akun Instagram GNFI (*Good News From Indonesia*) yang menampilkan Presiden Prabowo Subianto sebagai figur utama dalam pemberitaan. Unggahan tersebut dipilih karena relevan dengan fokus penelitian mengenai diskursus politik digital dan memunculkan interaksi pengguna melalui kolom komentar. Data komentar dikumpulkan menggunakan platform pihak ketiga melalui fitur *export comments*. Selanjutnya, komentar disusun berdasarkan urutan waktu publikasi, mulai dari komentar paling awal hingga komentar paling akhir, sebelum digabungkan menjadi satu korpus digital. Urutan kronologis tersebut dipertahankan dalam proses

pengolahan data agar distribusi istilah dapat dianalisis berdasarkan perkembangan komentar dalam korpus. Tahap praproses dilakukan dengan membersihkan unsur nontekstual yang tidak relevan, seperti simbol berlebih, tautan, pengulangan teknis, dan artefak sistem.

Penggunaan korpus memungkinkan eksplorasi terstruktur terhadap pola bahasa, dominasi istilah, serta relasi semantik dalam interaksi digital sebagai dasar untuk memahami konstruksi wacana komunikasi politik di ruang digital (Nasrullah, 2025).

Korpus teks selanjutnya dianalisis menggunakan *Voyant Tools*, sebuah perangkat analisis teks yang luas digunakan dalam kajian humaniora digital dan analisis wacana untuk memetakan struktur leksikal, kecenderungan tematik, serta hubungan semantik dalam teks digital (Ermanto et al., 2023). Pemanfaatan *Voyant Tools* memungkinkan integrasi antara eksplorasi kuantitatif awal dan interpretasi kualitatif lanjutan, sehingga penelitian tidak berhenti pada deskripsi statistik semata, tetapi tetap menempatkan konteks sosial, konteks penggunaan bahasa, dan dinamika

komunikasi politik sebagai pusat analisis (Susanto et al., 2025).

Analisis dilakukan melalui lima fitur utama dalam *Voyant Tools*, yaitu *Cirrus*, *TermsBerry*, *Trends*, *Documents*, dan *Bubblelines*. Fitur *Cirrus* digunakan untuk mengidentifikasi kata-kata dominan yang menunjukkan fokus utama diskursus publik. *TermsBerry* dimanfaatkan untuk memetakan jaringan relasi semantik antar istilah kunci, sehingga memperlihatkan struktur konseptual dan keterkaitan makna dalam wacana komentar.

Trends digunakan untuk mengidentifikasi perubahan distribusi istilah sepanjang korpus yang telah disusun secara kronologis, sehingga memungkinkan pengamatan terhadap pola kemunculan istilah berdasarkan urutan waktu komentar. *Documents* digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik umum korpus, seperti jumlah kata, variasi kosakata, dan rata-rata panjang kalimat, sehingga memberikan gambaran mengenai struktur linguistik data yang dianalisis. *Bubblelines* digunakan untuk memvisualisasikan lokasi dan distribusi kemunculan istilah di sepanjang korpus, sehingga pola kemunculan

Gambar 2. Visualisasi Relasi Semantik (TermsBerry) pada Korpus Komentar Instagram GNFI

(Sumber: Olahan peneliti menggunakan *Voyant Tools*, 2025)

Gambar 2 memperlihatkan bahwa kata "bukti" tidak berdiri sendiri, melainkan berelasi dengan istilah seperti "klaim", "narasi", "resmi", dan "informasi". Relasi tersebut menunjukkan bahwa istilah "bukti" berada dalam jaringan makna yang berkaitan dengan klaim, narasi, informasi resmi, dan validitas informasi. Keterkaitan ini mengindikasikan bahwa persoalan keabsahan klaim menjadi salah satu dimensi yang menonjol dalam diskursus warganet.

Kata "tindakan" dalam visualisasi juga terhubung dengan istilah seperti "perlu", "seharusnya", dan "langsung". Keterkaitan tersebut mengindikasikan adanya dimensi normatif dalam diskursus, terutama berkaitan dengan tindakan yang diharapkan dari aktor politik. Relasi antarterm ini menunjukkan bahwa tindakan menjadi salah satu aspek yang digunakan warganet dalam memberikan penilaian terhadap pernyataan dan aktor politik.

Kemunculan kata "presiden" yang terhubung dengan istilah seperti "berhenti", "pejabat", dan "kebijakan" menunjukkan adanya kecenderungan

diskursif yang mengarah pada personalisasi evaluasi politik. Kritik yang muncul tidak hanya diarahkan pada kebijakan atau isu tertentu, tetapi juga secara langsung mengaitkan tanggung jawab kepada figur pemimpin. Pola tersebut memperlihatkan bahwa evaluasi politik dalam korpus tidak hanya diarahkan pada isu atau kebijakan, tetapi juga dikaitkan dengan figur politik yang diasosiasikan dengan kebijakan dan tindakan tersebut.

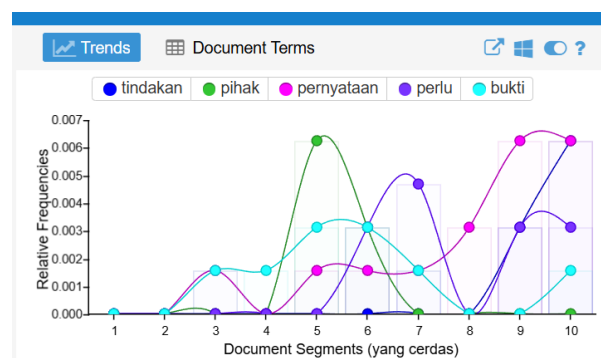
Struktur relasi semantik yang terbentuk dalam Gambar 2 menunjukkan bahwa istilah-istilah kunci dalam diskursus politik digital tidak berdiri secara terpisah, melainkan membentuk jaringan keterkaitan makna dalam korpus. Setiap istilah memperoleh konteks melalui keterhubungannya dengan istilah lain sehingga memperlihatkan bagaimana persoalan validitas informasi, tindakan, dan aktor politik saling beririsan dalam percakapan pengguna.

Secara keseluruhan, relasi antara "bukti", "tindakan", dan "presiden" menunjukkan keterkaitan antara persoalan validitas informasi, evaluasi tindakan, dan figur politik dalam diskursus warganet. Pola tersebut

mengindikasikan bahwa legitimasi politik dalam percakapan digital dinegosiasikan tidak hanya melalui pernyataan yang disampaikan, tetapi juga melalui penilaian terhadap tindakan dan tanggung jawab aktor politik.

Dinamika Temporal Diskursus: Pergeseran dari Validitas Informasi menuju Evaluasi Tindakan Politik

Analisis menggunakan fitur *Trends* dalam *Voyant Tools* menunjukkan adanya dinamika distribusi leksikal pada korpus komentar yang telah disusun secara kronologis. Kata-kata kunci seperti "bukti", "pernyataan", "tindakan", "pihak", dan "perlu" mengalami fluktuasi frekuensi pada segmen-segmen korpus, sehingga memperlihatkan perubahan pola kemunculan istilah berdasarkan urutan waktu komentar.



Gambar 3. Distribusi Temporal Istilah Kunci (Trends) dalam Korpus

Komentar Instagram GNFI (Sumber: Olahan peneliti menggunakan *Voyant Tools*, 2025)

Gambar 3 memperlihatkan bahwa istilah "bukti" cenderung muncul lebih awal dalam korpus, kemudian mengalami penurunan pada bagian selanjutnya. Pola tersebut menunjukkan bahwa persoalan validitas informasi lebih menonjol pada komentar-komentar awal, terutama melalui kemunculan istilah yang berkaitan dengan bukti dan keabsahan pernyataan politik. Dengan demikian, segmen awal korpus memperlihatkan kecenderungan diskursus yang berorientasi pada persoalan validitas informasi.

Distribusi istilah "pernyataan" dan "tindakan" menunjukkan peningkatan pada segmen pertengahan hingga akhir korpus. Pola tersebut mengindikasikan adanya pergeseran orientasi diskursus dari persoalan validitas informasi menuju perhatian terhadap pernyataan dan tindakan politik. Kemunculan kedua istilah tersebut memperlihatkan bahwa evaluasi terhadap tindakan aktor politik menjadi semakin menonjol pada bagian selanjutnya dari korpus.

Kemunculan kata “perlu” yang meningkat pada segmen tertentu memperkuat indikasi adanya dimensi normatif dalam diskursus. Istilah ini dapat berfungsi sebagai penanda modalitas yang berkaitan dengan tindakan yang dianggap perlu dilakukan oleh aktor politik. Pola tersebut menunjukkan bahwa diskursus tidak hanya memuat respons terhadap informasi, tetapi juga penilaian mengenai tindakan yang diharapkan dari aktor politik.

Distribusi kata “pihak” yang fluktuatif menunjukkan bahwa rujukan terhadap aktor atau entitas tertentu muncul pada berbagai bagian korpus. Pola ini memperlihatkan bahwa diskursus tidak hanya berkaitan dengan isi pernyataan, tetapi juga dengan pihak-pihak yang diasosiasikan dengan isu dan tindakan politik yang dibicarakan.

Dinamika temporal yang ditunjukkan dalam Gambar 3 memperlihatkan perubahan penekanan istilah pada bagian-bagian korpus yang berbeda. Segmen awal lebih banyak ditandai oleh istilah yang berkaitan dengan validitas informasi, sedangkan pada segmen berikutnya istilah yang berkaitan dengan pernyataan dan tindakan politik

menjadi lebih menonjol. Pola tersebut mengindikasikan adanya alur diskursif dari perhatian terhadap validitas informasi menuju evaluasi terhadap pernyataan dan tindakan politik.

Temuan ini menunjukkan bahwa distribusi istilah dalam diskursus politik digital bersifat dinamis sepanjang urutan kronologis komentar. Perubahan dominasi istilah memperlihatkan bahwa fokus percakapan dalam korpus tidak selalu berada pada aspek yang sama, tetapi bergerak dari persoalan validitas informasi menuju evaluasi terhadap pernyataan dan tindakan politik. Pola tersebut menjadi dasar untuk memahami terbentuknya alur diskursif verifikasi-evaluasi-tuntutan akuntabilitas yang dibahas lebih lanjut pada bagian diskusi.

Karakteristik Linguistik Korpus Komentar Warganet

Analisis terhadap ringkasan korpus (*Summary-Documents*) digunakan untuk menggambarkan karakteristik linguistik data penelitian. Jumlah total kata, variasi kosakata, serta rata-rata panjang kalimat memberikan gambaran mengenai struktur umum korpus yang dianalisis.

Tabel 1. Ringkasan Karakteristik
Korpus Komentar Instagram GNFI

Indikator	Nilai
Total kata (tokens)	640
Kata unik (types)	326
Rasio tipe	51%
Rata-rata kata per kalimat	30,5

Sumber: Hasil olahan peneliti
menggunakan *Voyant Tools*, 2025

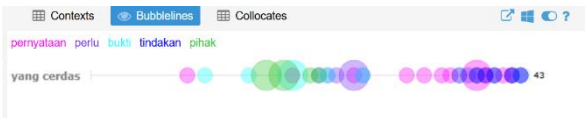
Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 640 token yang terdapat dalam korpus, teridentifikasi 326 bentuk kata unik (types) dengan rasio tipe sebesar 51%. Nilai tersebut memberikan gambaran mengenai variasi kosakata yang terdapat dalam korpus, tetapi tidak digunakan secara langsung untuk menentukan tingkat keberagaman atau kualitas diskursus. Oleh karena itu, karakteristik leksikal ini dibaca bersama dengan pola frekuensi dan relasi antarterm pada hasil analisis lainnya.

Rata-rata panjang kalimat sebesar 30,5 kata menunjukkan bahwa teks dalam korpus tidak seluruhnya tersusun dalam bentuk kalimat yang sangat singkat atau fragmentaris. Namun, panjang kalimat tidak dengan

sendirinya menunjukkan kualitas argumentasi atau kedalaman pemikiran pengguna. Data tersebut digunakan sebagai karakteristik deskriptif korpus dan dibaca bersama dengan konteks serta relasi semantik antarterm dalam analisis.

Distribusi Istilah Kunci dalam Struktur Korpus

Analisis menggunakan visualisasi *Bubblelines* dalam *Voyant Tools* digunakan untuk mengamati lokasi dan distribusi kemunculan istilah kunci pada berbagai bagian korpus. Kata-kata seperti “pernyataan”, “perlu”, “bukti”, “tindakan”, dan “pihak” memperlihatkan pola distribusi yang berbeda, sehingga melengkapi hasil analisis *Trends* mengenai perubahan kemunculan istilah dalam urutan kronologis komentar.



Gambar 4. Distribusi Istilah Kunci
(*Bubblelines*) dalam Korpus Komentar
Instagram GNFI (Sumber: Hasil olahan
peneliti menggunakan *Voyant Tools*,
2025)

Gambar 4 menunjukkan bahwa istilah “bukti” cenderung lebih menonjol pada bagian awal korpus. Pola ini memperkuat hasil *Trends* yang menunjukkan bahwa persoalan validitas informasi lebih banyak muncul pada komentar-komentar awal. Dengan demikian, istilah yang berkaitan dengan keabsahan informasi memiliki distribusi yang lebih menonjol pada bagian awal urutan komentar.

Istilah “pernyataan” dan “pihak” menunjukkan distribusi yang lebih merata pada berbagai bagian korpus. Pola tersebut memperlihatkan bahwa rujukan terhadap pernyataan politik dan pihak-pihak yang berkaitan dengan isu yang dibicarakan muncul pada berbagai bagian urutan komentar.

Kemunculan istilah “tindakan” dan “perlu” cenderung lebih menonjol pada bagian pertengahan hingga akhir korpus. Distribusi tersebut memperkuat indikasi adanya pergeseran dari persoalan validitas informasi menuju evaluasi terhadap tindakan politik. Keterkaitan kata “perlu” dengan bagian diskursus tersebut juga menunjukkan adanya dimensi normatif mengenai tindakan yang diharapkan dari aktor politik.

Secara keseluruhan, visualisasi *Bubblelines* memperkuat pola distribusi yang ditemukan melalui *Trends*. Istilah yang berkaitan dengan validitas informasi lebih menonjol pada bagian awal korpus, sedangkan istilah yang berkaitan dengan pernyataan, tindakan, dan tuntutan normatif lebih terlihat pada bagian berikutnya. Pola distribusi tersebut mendukung adanya alur diskursif dari perhatian terhadap validitas informasi menuju evaluasi pernyataan dan tindakan politik dalam urutan kronologis komentar.

Transformasi media sosial sebagai ruang publik digital telah menggeser proses pembentukan legitimasi politik dari pola komunikasi yang cenderung terpusat menuju proses yang semakin terdistribusi dan partisipatif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kolom komentar Instagram GNFI tidak hanya berfungsi sebagai ruang respons terhadap informasi politik, tetapi juga menjadi arena diskursif tempat warganet memproduksi, mempertanyakan, dan menegosiasikan makna politik. Komunikasi politik digital dengan demikian tidak berhenti pada pesan yang diproduksi media atau aktor politik, tetapi berlanjut melalui respons pengguna yang memberikan

penilaian terhadap informasi, figur, dan tindakan politik.

Dominasi kata "bukti" dalam korpus menunjukkan kuatnya orientasi diskursus terhadap persoalan validitas informasi. Kemunculannya bersama kata "pernyataan", "tindakan", "presiden", dan "pihak" memperlihatkan bahwa informasi politik tidak semata diterima sebagai pesan, tetapi menjadi objek pertanyaan dan evaluasi. Temuan ini relevan dengan persoalan kredibilitas dalam komunikasi politik digital, ketika klaim politik dapat diproduksi sekaligus dipertanyakan secara terbuka. Dalam perspektif Castells (2013), kekuasaan dalam masyarakat jaringan berkaitan dengan kemampuan membentuk makna melalui proses komunikasi. Dalam konteks penelitian ini, proses tersebut tidak hanya bergerak dari media kepada khalayak, tetapi juga berlangsung melalui evaluasi dan respons yang diproduksi pengguna. Dominasi kata "bukti" karena itu lebih tepat dipahami sebagai indikasi bahwa keabsahan informasi menjadi salah satu pusat diskursus warganet, bukan sebagai bukti bahwa seluruh pengguna telah melakukan verifikasi informasi secara faktual. Kecenderungan

tersebut sejalan dengan Legowo (2023) yang menunjukkan bahwa persoalan disinformasi di media sosial mendorong kebutuhan terhadap informasi berbasis data serta praktik pemeriksaan informasi yang menekankan objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Relasi semantik antara "bukti", "pernyataan", dan "tindakan" memperlihatkan bahwa diskursus tidak berhenti pada persoalan benar atau tidaknya informasi. *TermsBerry* menunjukkan bahwa "bukti" berelasi dengan "klaim", "narasi", "resmi", dan "informasi", sedangkan "tindakan" terhubung dengan "perlu", "seharusnya", dan "langsung". Struktur tersebut menunjukkan keterkaitan antara persoalan validitas informasi dan evaluasi normatif terhadap tindakan aktor politik. Legitimasi dengan demikian tidak hanya berkaitan dengan apakah suatu pernyataan dianggap benar, tetapi juga dengan konsistensi antara pernyataan dan tindakan.

Meskipun demikian, keberadaan bukti dalam percakapan politik digital tidak selalu menghasilkan perubahan sikap. Kim dan Kim (2019) menemukan bahwa *supporting evidence* dalam komentar yang berbeda pandangan

tidak dengan sendirinya menentukan polarisasi sikap; karakter interaksi seperti ketidaksantunan dan emosi negatif juga berperan dalam respons pengguna. Temuan penelitian GNFI memiliki fokus berbeda karena tidak mengukur efek persuasif bukti terhadap perubahan sikap, melainkan memperlihatkan posisi "bukti" sebagai unsur diskursif dalam mempertanyakan dan mengevaluasi klaim politik. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa bukti dalam komunikasi politik digital tidak hanya relevan dari sisi efek persuasifnya, tetapi juga sebagai bagian dari proses pembentukan makna dalam percakapan publik.

Dinamika istilah melalui Trends dan Bubblelines semakin memperjelas pola tersebut. Kata "bukti" cenderung muncul pada segmen awal korpus, sedangkan "pernyataan", "tindakan", dan "perlu" menguat pada bagian berikutnya. Distribusi tersebut mengindikasikan alur diskursif yang bergerak dari perhatian terhadap validitas informasi menuju evaluasi pernyataan dan kemudian tuntutan terhadap tindakan. Istilah "perlu" memperlihatkan dimensi normatif karena warganet tidak hanya menilai informasi, tetapi juga

mengartikulasikan ekspektasi mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan aktor politik. Namun, aktivitas tersebut tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai peningkatan pengetahuan politik. Amsalem dan Zoizner (2023), melalui meta-analisis terhadap 76 penelitian, menemukan bahwa penggunaan media sosial tidak serta-merta meningkatkan pengetahuan politik. Oleh karena itu, pola dalam komentar GNFI lebih tepat dipahami sebagai aktivitas diskursif dalam mengevaluasi informasi politik, bukan sebagai bukti bahwa keterlibatan di media sosial secara otomatis menghasilkan pengguna yang lebih berpengetahuan secara politik.

Karakteristik korpus turut memberikan gambaran mengenai variasi ekspresi linguistik warganet. Data mencatat 640 *tokens*, 326 *types*, rasio tipe sebesar 51 persen, serta rata-rata 30,5 kata per kalimat. Namun, variasi leksikal tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan keberagaman posisi ideologis. Ketika dibaca bersama relasi semantik dan konteks komentar, variasi tersebut lebih tepat dipahami sebagai indikasi beragamnya bentuk ekspresi dalam mempertanyakan,

mengevaluasi, dan memberikan penilaian terhadap informasi politik. Interpretasi ini penting agar karakteristik linguistik korpus tidak digunakan untuk menghasilkan generalisasi yang melampaui kapasitas data.

Kecenderungan kritik yang diarahkan kepada figur politik menunjukkan dimensi personalisasi dalam diskursus. Kemunculan kata "presiden" yang berelasi dengan "pejabat" dan "kebijakan" memperlihatkan bahwa evaluasi tidak hanya diarahkan pada isu, tetapi juga kepada figur yang diasosiasikan dengan tindakan politik. Metz et al. (2020) menunjukkan bahwa personalisasi politik di media sosial dapat berlangsung melalui dimensi profesional, emosional, dan privat dalam komunikasi aktor politik. Dalam konteks Instagram, Parmelee et al. (2023) juga menunjukkan pentingnya personalisasi dan komunikasi dua arah dalam membentuk persepsi audiens terhadap figur politik. Penelitian ini memperluas perspektif tersebut dengan menunjukkan bahwa personalisasi tidak hanya diproduksi oleh aktor politik melalui presentasi diri, tetapi juga melalui cara warganet

mengevaluasi politik. Ketika kritik, tanggung jawab, dan tuntutan diarahkan kepada figur, individu menjadi salah satu pusat produksi makna terhadap tindakan dan legitimasi politik.

Temuan tersebut juga menunjukkan bahwa diskursus politik digital tidak sepenuhnya bergerak dalam kerangka argumentasi rasional. Evaluasi terhadap informasi dapat hadir bersamaan dengan ekspresi emosional dan penilaian terhadap figur. Barfar (2019) menemukan bahwa respons terhadap disinformasi politik di Facebook cenderung kurang analitis serta lebih banyak mengandung kemarahan dan ketidaksantunan dibandingkan respons terhadap informasi yang benar. Popan et al. (2019) juga menunjukkan bahwa ketidaksantunan dalam diskusi politik daring dapat menurunkan persepsi terhadap rasionalitas diskusi. Temuan penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa dimensi kognitif dan afektif dapat hadir secara bersamaan dalam diskusi politik daring. Dalam konteks GNFI, kemunculan 'bukti', evaluasi terhadap 'pernyataan', dan perhatian terhadap 'tindakan' memperlihatkan pertemuan

antara persoalan validitas informasi dan penilaian normatif terhadap aktor politik. Sementara itu, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa proses evaluasi dalam komunikasi politik digital juga dapat berlangsung berdampingan dengan dimensi afektif.

Kolom komentar dengan demikian dapat dipahami sebagai ruang negosiasi makna yang bersifat kolektif, tetapi tidak serta-merta menjadi ruang deliberatif yang ideal. Interaksi pengguna memungkinkan penerimaan, penguatan, koreksi, maupun penolakan terhadap klaim politik, sementara personalisasi dan ekspresi emosional dapat berkembang dalam proses yang sama. Kondisi tersebut memperlihatkan ambivalensi ruang publik digital: keterbukaan partisipasi memperluas kesempatan pengguna terlibat dalam pembentukan diskursus, tetapi tidak menjamin seluruh percakapan berlangsung secara rasional dan deliberatif.

Berdasarkan keseluruhan temuan, kontribusi utama penelitian ini terletak pada identifikasi alur diskursif verifikasi-evaluasi-tuntutan akuntabilitas dalam komentar Instagram GNFI. Cirrus menunjukkan dominasi istilah yang berkaitan dengan validitas informasi;

TermsBerry memperlihatkan relasi antara "bukti", "pernyataan", "tindakan", dan aktor politik; sedangkan *Trends* dan *Bubblelines* memperlihatkan perubahan distribusi istilah pada bagian korpus. Integrasi temuan tersebut menunjukkan bahwa legitimasi politik tidak semata diterima dari aktor atau media, tetapi dinegosiasikan melalui proses mempertanyakan validitas klaim, mengevaluasi konsistensi pernyataan dan tindakan, serta mengartikulasikan tuntutan akuntabilitas. Dalam konteks personalisasi, penelitian ini juga menunjukkan proses dua arah: figur dapat membangun presentasi diri melalui media sosial, sementara pengguna turut memproduksi evaluasi yang menempatkan figur sebagai pusat dukungan, kritik, maupun evaluasi politik.

Implikasi praktis penelitian ini menunjukkan bahwa aktor politik dan institusi media perlu memahami kolom komentar sebagai bagian dari ekologi komunikasi politik, bukan sekadar ruang reaksi setelah pesan dipublikasikan. Kredibilitas komunikasi tidak cukup dibangun melalui penyampaian informasi, tetapi membutuhkan kejelasan dasar klaim,

konsistensi antara pernyataan dan tindakan, serta keterbukaan terhadap evaluasi pengguna. Bagi media digital seperti GNFI, dinamika komentar menjadi penting karena ruang tersebut memungkinkan informasi, figur, dan tindakan politik memperoleh pemaknaan lanjutan. Dengan demikian, legitimasi dalam komunikasi politik digital tidak hanya diproduksi melalui pesan awal, tetapi terus diuji, dipertanyakan, dan dinegosiasikan melalui interaksi pengguna.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa diskursus politik digital dalam komentar Instagram GNFI terbentuk melalui proses yang tidak hanya berorientasi pada respons terhadap informasi, tetapi juga pada perhatian terhadap validitas informasi, evaluasi terhadap pernyataan, dan tuntutan terhadap tindakan aktor politik. Dominasi kata "bukti" serta relasinya dengan "pernyataan", "tindakan", "presiden", dan "perlu" menunjukkan bahwa warganet dalam korpus penelitian ini menempatkan kredibilitas informasi dan konsistensi tindakan sebagai bagian penting dalam pembentukan makna politik. Temuan

tersebut memperlihatkan bahwa legitimasi politik di ruang digital tidak semata diterima melalui pesan yang diproduksi media atau aktor politik, tetapi terus dipertanyakan dan dinegosiasikan melalui interaksi pengguna.

Orientasi verifikatif ditunjukkan melalui perhatian terhadap 'bukti' dan validitas klaim, evaluasi berkembang melalui hubungan antara 'bukti' dan 'pernyataan', sedangkan tuntutan akuntabilitas terlihat melalui keterkaitan dengan 'tindakan', 'perlu', dan figur politik. Personalisasi juga menjadi bagian dari proses tersebut ketika evaluasi terhadap kebijakan dan tindakan diarahkan kepada figur yang dianggap merepresentasikannya. Dengan demikian, kolom komentar GNFI dapat dipahami sebagai ruang negosiasi makna tempat informasi, tindakan, dan figur politik memperoleh penilaian lanjutan dari pengguna.

Kontribusi penelitian ini terletak pada identifikasi alur diskursif tersebut sebagai bagian dari proses pembentukan legitimasi dalam komunikasi politik digital. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa personalisasi tidak hanya berlangsung melalui strategi presentasi diri aktor politik,

tetapi dapat terbentuk melalui cara pengguna menempatkan figur sebagai pusat dukungan, kritik, maupun evaluasi politik. Namun, temuan penelitian terbatas pada korpus komentar Instagram GNFI sehingga tidak dimaksudkan untuk merepresentasikan keseluruhan diskursus politik masyarakat Indonesia. Penelitian selanjutnya dapat

memperluas korpus, membandingkan beberapa akun atau platform, serta mengombinasikan analisis korpus dengan analisis kualitatif yang lebih mendalam untuk melihat bagaimana pola verifikasi, evaluasi, dan tuntutan akuntabilitas dibentuk dalam konteks komunikasi politik digital yang berbeda.

REFERENSI

- Amin, K., Alfarauqi, M. D. A., & Khatimah, K. (2018). Social media, cyber hate, and racism. *Komuniti: Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi*, 10(1), 3-10.
- Amri, Y., & Yandri, L. I. (2025). *ALGORITMA MEDIA SOSIAL DAN POLARISASI POLITIK DALAM DEMOKRASI DIGITAL DI INDONESIA*.
- Amsalem, E., & Zoizner, A. (2023). Do people learn about politics on social media? A meta-analysis of 76 studies. *Journal of Communication*, 73(1), 3-13.
- Barfar, A. (2019). Cognitive and affective responses to political disinformation in Facebook. *Computers in Human Behavior*, 101, 173-179.
- Birowo, A. (2025). *Politik Persepsi Di Era AI: Ketika Kekuasaan Bekerja di Medan Kognitif*. Visikata.
- Castells, M. (2013). *Networks of outrage and hope: Social movements in the Internet age*. John Wiley & Sons.
- Eko Wahyunto, M. M. (2025). *Manajemen Komunikasi Digital*. CV. Mitra Edukasi Negeri.
- Ermanto, S. P., Ardi, H., & Juita, N. (2023). *Linguistik Korpus: Aplikasi Digital Untuk Kajian Dan Pembelajaran Humaniora*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Fatimah, S. (2025). Transformasi ruang publik digital: tantangan sosial dan konstitusional dalam demokrasi era media baru. *Cakrawala*, 19(1), 67-86.
- Hadi, I. P. (2021). *Penelitian Media Kualitatif-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Irawan, E. P., Retnowati, Y., Adnyana, P. E. S., Anwar, R., & Candra, F. (2025). *Komunikasi Politik: Teori, Strategi, dan Implementasi*. PT. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia.
- Iswadi, M. P. (2025). *Komunikasi Politik Digital*. PT Penerbit Qriset Indonesia.
- Kim, Y., & Kim, Y. (2019). Incivility on Facebook and political polarization: The mediating role of seeking further comments and negative emotion. *Computers in Human Behavior*, 99, 219-227.
- Legowo, R. S. (2023). Ketika Penyebaran Berita Palsu Melahirkan Industri Baru: Studi Kasus Drone Emprit. *Komuniti: Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi*, 15(1), 75-97.
- Metz, M., Kruikemeier, S., & Lecheler, S. (2020). Personalization of politics on Facebook: Examining the content and effects of professional, emotional and private self-personalization. *Information, Communication & Society*, 23(10), 1481-1498.
- Nasrudin, S. H., MH, M. C. E., & Nina Nursari, S. E. (2025). *Buku Pengantar Sosiologi (Teori, Realitas, Dan Transformasi Sosial Di Abad 21)*. Penerbit Widina.
- Nasrullah, R. (2025). *Metodologi Penelitian Linguistik*. CV Eureka Media Aksara.
- Parmelee, J. H., Perkins, S. C., & Beasley, B. (2023). Personalization of politicians on Instagram: what Generation Z wants to see in political posts. *Information, Communication & Society*, 26(9), 1773-1788.
- Popan, J. R., Coursey, L., Acosta, J., & Kenworthy, J. (2019). Testing the effects of incivility during internet political discussion on perceptions of rational argument

- and evaluations of a political outgroup. *Computers in Human Behavior*, 96, 123-132.
- Prasojo, P. (2026). Analisis Komunikasi Keamanan: Perubahan Budaya Dalam Politik Generasi Z. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 26(1), 71-84.
- Pratama, H. S. (2019). Masyarakat Jejaring, Media Sosial, Dan Transformasi Ruang Publik: Refleksi Terhadap Fenomena Arab Spring Dan "Teman Ahok." *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya*.
- Puluhulawa, F. Y., Kurniasih, S., Utami, A. D., & Widowati, I. G. A. R. (2026). Media, Budaya, Dan Komunikasi. *Padang: Cv Hei Publishing Indonesia*.
- Pureklolon, T. P. (2016). *Komunikasi politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sari, I. (2026). *Media Komunikasi Pemerintahan: Teori, Praktik, Etika, dan Tantangan Demokrasi Digital*. CV Eureka Media Aksara.
- Susanto, M. R., Nasution, U. B., & Supriyono, L. A. (2025). *Metodologi penelitian lanjutan*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Syam, F. F. (2025). Efek Polarisasi Algoritma Media: Analisis Teori Power Dan Knowledge Michel Foucault. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 3424-3531.
- Zaka, M. A. (2024). *DISKURSUS KRITIS ISU POLITIK PEMILU 2024 Analisis Wacana Kritis Tentang Keterlibatan Jokowi Dalam Pemilu 2024 Pada Akun YouTube Rocky Gerung Official*. UNIVERSITAS LAMPUNG.